

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, “ *Hukum dan Penelitian Hukum*”, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Cheppy Hariyono, 1991, “*Ilmu Politik dan Prespektifnya*”, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya.
- Dadang Suwanda, 2016, “*Peningkatan Fungsi DPRD*”, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Djoko Prakoso, 1985, “ *Proses Pembentukan Peraturan Daerah* ”, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Edi Suharto, 2007, “*Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara, Mandatory “Politik Kesejahteraan di Tanah Republik*, Yogyakarta, Institute For Research and Empowerment.
- Eko Prasetyo dkk, 2008, “*Buku Ajar Hak Asasi Manusia*”, Yogyakarta, PUSHAM UII.
- Fais Yonas Boa’a, 2017, “*Pancasila Dalam Kebijakan Sistem Hukum*”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ishak Salim dkk, 2014, “*Memahami Pemilihan Umum dan Gerakan Politik Kaum Difabel*”, Yogyakarta, SIGAB
- Jazim Hamidi dan Kemilau Muntik, 2011, “*Legislatif Drafting*”, Yogyakarta, Total media.
- King Faisal Sulaiman, 2017, “*Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*,” Bantul, Thafa Media.
- Leah Levin, 1987, “*Hak Asasi Manusia “tanya jawab*”, Jakarta , PT Pradnya Paramita.
- Lijan Poltak Sinambela, 2014, “*Reformasi Pelayanan Publik*”, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Mediya Lukman, 2013, “*Badan Layanan Umum dari Birokrasi Menuju Korporasi*”, Jakarta, Bumi Aksara.
- M.Riawan Tjandra dan Kresno Budi Sudarsono, 2009, “*Legislative Drafting : Teori dan Teknik Pembentukan Peraturan Daerah*”, Yogyakarta, Universitas Atmajaya.

- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2006, "*Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*", Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Rony Hanitijo Soemitro, 1985, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Rob Koudstaal dan Vijay Paranjpye, 2011, "*Melibatkan Masyarakat*", Bogor, Telapak
- R.Siti Zuhro, dkk, 2010, "*Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusi*", Yogyakarta, Penerbit Ombak.
- Samuel Huntington dan Joan Nelson, 1990, "*Partisipasi Politik di Negara Berkembang*", Jakarta, Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 1986, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- Soehino, 2013, "*Hak Asasi Manusia(Perkembangan Pengetahuan dan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia)*", Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM.
- Yahya Ahmad Zein dkk, 2016, "*Legislative Drafting*", Bantul, Thafa Media
- Yuliandri, 2011, "*Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik : Gagasan Pembentukan Undang- Undang Berkelanjutan*" ,Jakarta, Rajawali Press.

Jurnal :

- Amir Muhidin, "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*", Jurnal Otoritas, Volume III Nomor 1 (April 2013).
- Iza Rumensten RS, "*Relevansi Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang Responsif*", Jurnal Simbur Cahaya, Volume XVI Nomor 44 (Januari 2011).
- Jazim Hamidi, "*Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan*", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume IV Nomor V (Oktober 2016).

- Kurniawan Kunto Yuliarso dan Nunung Prajarto, "*Hak Asasi Manusia di Indonesia : Menuju Democratic Governance*", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume XIII Nomor IV (Maret 2005).
- Mashuri, "*Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pembangunan Demokrasi*", Jurnal Kewirausahaan, Volume XIII Nomor 2 (Desember 2014).
- M.Syafi'ie, "*Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas*", Jurnal Inklusi, Volume 1 Nomor 3 (Juli- Desember 2014).
- Muhammad Suharjono, "*Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah*", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10 Nomor 2 (Februari 2014).
- Saharudin Daming, "*Menakar Publik terhadap Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Kemanusiaan Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia* ", Jurnal Perempuan, Volume 1 Nomor 1(Februari2011).
- Sahdila Rahayu, "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Ranah Baru Kabupaten Kampar*", Jurnal FISIP Universitas Riau, Volume 2 Nomor 1 (Februari 2015).
- Slamet Thohari, "*Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang*", Indonesian Journal of Disability Studies, Volume 1 Nomor 1 (Juni 2014).

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Mengenai Hak Hak Penyandang Disabilitas;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas;

Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD.

Internet:

Dinas Sosial Provinsi DIY, 2016, *Dinsos Catat Ada 25 Ribu lebih Penyandang Disabilitas di DIY* Pemerintah Provinsi DIY, <http://jogja.tribunnews.com>, 23/12/2017.